



Judul : Akar persoalan inflasi, data pangan nggak sinkron
Tanggal : Senin, 17 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Akar Persoalan Inflasi

Data Pangan Nggak Sinkron

Senayan mengingatkan pentingnya pembenahan data pangan nasional sebagai dasar pengendalian inflasi yang akurat dan terukur. Temuan di sejumlah daerah, ketidaksesuaian antara data surplus pangan dan harga komoditas justru meningkat.

ANGGOTA Komisi XI DPR Andi Yuliani Paris menegaskan, akar persoalan inflasi pangan tidak hanya pada produksi dan distribusi, tapi juga pada kualitas data yang menjadi rujukan Pemerintah. Pasalnya, data produktivitas pangan sering tidak akurat.

"Misalnya beras disebut surplus, tetapi harga di beberapa daerah tetap tinggi. Cabe merah naik, tomat naik, telur naik. Ini menunjukkan ada masalah pada data atau distribusi," jelas Andi dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).

Andi lalu mencontohkan ketidaksesuaian data produksi pangan nasional. Untuk telur ayam, ada produktivitas yang luar biasa bahkan ada selisih hingga setengah ton. Jika memang benar surplus, harga seharusnya turun. "Tapi yang terjadi harga naik. Berarti ada data yang tidak sinkron," tutur legislator Fraksi PAN itu.

Politikus asal Dapil Sulsel II itu menegaskan, perbaikan data dan komunikasi antarlembaga harus menjadi fokus utama Pemerintah. Data harus akurat dan terdistribusi dengan baik. Selain itu, komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga perlu diperkuat. "Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus punya data yang sama, supaya kebijakan inflasi bisa tepat," tegasnya.

Komisi XI, sambungnya, berkomitmen menindaklanjuti temuan ini melalui pembahasan dengan kementerian terkait, Bank Indonesia, hingga Pemda. Hal tersebut untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berbasis data yang valid dan berpihak pada masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menambahkan, pihaknya melihat ada peningkatan inflasi khususnya pada pola konsumsi. Inflasi sektor pangan



Andi Yuliani Paris

didorong beberapa komoditas seperti beras, telur, dan daging ayam. Untuk itu, harus ada strategi intervensi yang lebih komprehensif. "Ini perlu diantisipasi karena sudah berada di atas batas maksimal lima persen yang kita sepakati antara Pemerintah dan DPR," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu mendorong pengendalian inflasi dari sisi hulu. Pasalnya, selama ini intervensi Pemerintah dan TPID cenderung berada di hilir, sep-

erti operasi pasar, buffer stock, dan kelancaran distribusi. Menurutnya, saat ini urgensi telah berubah.

"Kita mendorong Bank Indonesia bersama TPID mulai memikirkan skema pengendalian inflasi di sektor hulu agar kenaikan harga pangan tidak terulang lagi," tegas legislator Dapil DKI Jakarta III itu.

Dia juga menyoroti perlunya kesiapan menghadapi kebutuhan komoditas untuk program prioritas Pemerintah tahun 2026. Koordinasi TPID harus lebih intensif, bukan lagi sekali seminggu, bahkan, jika memungkinkan seminggu tiga kali.

"Tahun 2026 akan ada captive market besar untuk program prioritas nasional MBG, dan antisipasinya harus dimulai dari sekarang," ingatnya.

Selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mewaspada inflasi kelompok volatil food atau inflasi pangan yang sudah mulai meningkat beberapa waktu terakhir. Dia membeberkan, harga-harga pangan yang bergejolak pada beberapa waktu terakhir mulai meningkat.

"Bahkan, pada Oktober 2025

meningkat menjadi 6,59 persen, terutama didorong peningkatan harga beberapa komoditas bahan pokok seperti cabai merah, dan telur ayam ras," terangnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penurunan harga beras nasional pada Oktober 2025 berperan signifikan sebagai peredam laju inflasi nasional. Hal tersebut menunjukkan kinerja positif dari seluruh pihak, terutama di sektor pangan, dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Dia menambahkan, tekanan inflasi global masih terjadi akibat kenaikan harga emas internasional yang mencapai lebih dari 40 persen karena faktor geopolitik dunia. Namun, di dalam negeri, koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok, termasuk beras yang justru mengalami deflasi di sebagian besar provinsi.

"Pangan kita genjot terus biar harga bagus dan ketersediaan bagus. Kami mohon dukungan dari Menteri Pertanian yang mengatur dan memperkuat sektor ini," katanya. ■ PYB